



KR-Antara/Praselia Fauzani

**KECELAKAAN KERETA DI KEDIRI: Sejumlah petugas mengevakuasi Kereta Api Kertanegara yang mengalami kecelakaan di Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (10/3/2025). Kereta Api Kertanegara jurusan Malang-Purwokerto tersebut bertabrakan dengan truk pengangkut pupuk di perlintasan tanpa palang pintu KM 175+4 antara Stasiun Kras-Ngadiluwih Kabupaten Kediri dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia.**

## Total Anggaran PSU Rp 719 Miliar

**JAKARTA (KR)** - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, total anggaran pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 mencapai Rp719 miliar. Total penyelenggaraan PSU di 24 daerah itu telah disesuaikan dengan efisiensi anggaran dan total anggaran itu telah mengalami penurunan.

Mendagri Tito dalam raker bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (10/3) menyebutkan, KPU di daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 429.725.922.805 atau 59,75 persen. Bawaslur Rp 158.919.295.848 (22,10 persen), TNI Rp 38.531.459.000 (5,36 persen), Polri Rp 91.993.554.893 (12,79 persen), dengan demikian total Rp 719.170.232.546.

Adapun Kementerian Dalam Negeri awalnya memperkirakan anggaran PSU sekitar Rp 1 triliun. Kendati demikian, Tito meminta KPU dan Bawaslur dapat melakukan efisiensi anggaran seminimal mungkin agar tidak membebani APBD. Selain itu, Tito mengatakan, untuk anggaran PSU di sebagian TPS dapat dipenuhi dari APBD pemerintah daerah masing-masing. Hal ini juga termasuk PSU seluruh-

nya pun beberapa dapat dipenuhi APBD.

"Barusan juga menerima konfirmasi lagi kepada Pj Gubernur Papua Pak Ramses Limbong yang menyatakan mereka sudah melakukan efisiensi dan bisa dipenuhi, bisa diambil dari APBD Papua," ujarnya.

Komisi II DPR RI melakukan pengecekan ke Mendagri, KPU, Bawaslur dan DKPP untuk memastikan kesiapan anggaran PSU Pilkada 2024 bagi 24 daerah se-Indonesia. Hal itu dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, kemarin.

Dede Yusuf juga meminta penjelasan tentang kepastian anggaran dan pelaksanaannya mulai dari Mendagri, pimpinan KPU, Bawaslur, dan DKPP baik untuk PSU, PUS-

dan rekapitulasi suara ulang sebagaimana putusan MK. Sebab, pada Raker dan RDP sebelumnya, Kemendagri waktu itu kepada Komisi II DPR RI untuk memastikan kesiapan anggaran pelaksanaan putusan MK.

"Komisi II DPR RI akan mendelegasikan laporan langsung dari Mendagri tentang persiapan dan kesiapannya," ujar Dede.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan PSU di 24 daerah setelah memutuskan sengketa hasil Pilkada 2024. Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno yang berlangsung Senin (24/2). Sembilan hakim konstitusi telah menuntaskan pembacaan keputusan atas 40 perkara yang diperiksa secara lanjut.

Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi RI, dari seluruh perkara tersebut, MK mengabulkan 26 permohonan, menolak 9 perkara dan tidak menerima 5 perkara lainnya.

Dari 26 permohonan yang dikabulkan, sebanyak 24 perkara menghasilkan keputusan untuk menggelgar PSU. KPU di daerah terkait wajib menjalankan putusan ini sesuai dengan instruksi MK. (Ant/Obi)-d

### KEPALA BKN PASTIKAN

## Proses Penetapan NIP CPNS-PPPK Berlanjut

**JAKARTA (KR)** - Pembahasan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai tindak lanjut penyelesaian jadwal CASN TA 2024 dengan seluruh instansi Pemerintah terus berlanjut.

Demikian Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arief dalam Rapat Penyesuaian Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024 secara daring, Senin (10/3).

Karena itu, Kepala BKN meminta agar semua instansi terus melanjutkan pengusulan NIP sampai dengan proses pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 selesai. Kelanjutan proses penetapan usul NIP dan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) hingga pengangkatan CASN 2024 dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan melalui Surat Menteri PAN-RB Nomor B/1043/M.SM. 01.00/2025; dan Surat Kepala BKN

Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi Calon ASN Kebutuhan Tahun 2024.

"Berdasarkan jadwal yang ditetapkan lewat rapat bersama Kementerian PANRB dengan Komisi II DPR RI, BKN menyusun roadmap penyelesaian pengangkatan CASN 2024, maka BKN menerbitkan surat kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK instansi, dimana agar semua instansi terus mengusulkan dan memproses penetapan NIP CPNS dan PPPK dan tetap dilanjutkan sampai dengan pengangkatan selesai," terangnya.

Di dalam surat Kepala BKN tersebut ditetapkan bahwa usul penetapan NIP CPNS akan dilakukan paling lambat 30 Juni 2025, dimana peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi CPNS TMT 1 Oktober 2025. Pertimbangan Teknis atau Pertek Penetapan Nomor Induk CPNS yang telah diterbitkan juga akan

disesuaikan menjadi TMT 1 Oktober 2025, yang dilanjutkan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang akan diterbitkan pada tanggal yang sama.

Selanjutnya usul penetapan Nomor Induk PPPK 2024 dilakukan paling lambat 30 November 2025. Dilanjutkan dengan Pertek Penetapan Nomor Induk PPPK yang akan ditetapkan menjadi TMT 1 Maret 2026 dan Melaksanakan Perjanjian Kerja pada 1 Maret 2026. Sementara itu, bagi pelamar PPPK yang pada 1 Maret 2026 telah melampaui batas usia pengangkatan tetapi belum melewati batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, akan tetap diangkat sebagai PPPK dengan masa perjanjian kerja selama satu tahun.

"Ini kebijakan-kebijakan dalam rangka kita memastikan bahwa proses ini terus berlanjut sampai dengan penerbitan SK CPNS maupun SK PPPK," kata Zudan. (Ati)-d

### REVISI UU PENYIARAN

## Harus Relevan untuk 50 Tahun ke Depan

**JAKARTA (KR)** - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan, revisi terhadap Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus bisa relevan atau masih bisa dimanfaatkan hingga 20 sampai 50 tahun ke depan.

Menurut Dave, Undang-Undang Penyiaran yang berlaku saat ini masih terbelakang, sebab masih mengatur sistem penyiaran secara analog. Padahal saat ini era penyiaran sudah berubah ke sistem digital.

"Tinggal produk-produk hukum turunan di bawahnya itu yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman," kata Dave saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah

lembaga penyiaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/3).

Untuk itu, menurutnya, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Penyiaran itu harus mempelajari sistem penyiaran yang diterapkan di negara-negara lain guna menopang industri penyiaran lokal.

"Apakah selain soal pemancarnya, konten yang disediakan, ini semua saling berkaitan, karena ini menopang kehidupan khalayak banyak," katanya.

Selain itu, RUU Penyiaran juga perlu mengatur dan melindungi generasi muda dari konten-konten yang bisa berdampak buruk. Saat

ini, kata Dave, anak-anak sudah sangat tergantung kepada gawai pintar yang menampilkan berbagai jenis konten.

"Inilah gunanya Undang-Undang Penyiaran kita ini untuk kita bisa beri perlindungan dan memberikan pengamanan kepada anak-anak kita, sehingga generasi kita ke depan jangan sampai tergerus akhlakunya," ujarnya.

Untuk itu, Dave ingin agar RUU Penyiaran perlu mendengar berbagai masukan agar tidak terkesan sebagai RUU yang 'asal jadi', karena jika RUU tersebut mengalami kekurangan maka akan mudah untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Ant)-d

### SINAU SEJARAH HADEGING NAGARI

## Gedhong Garjitowati Situs Penting di Tamansari



KR-Wawan Isnawan

Baha Uddin MHum di situs Gedhong Garjitowati, Tamansari.

**YOGYA (KR)** - Gedhong Garjitowati merupakan situs penting sejarah berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Di Gedhong Garjitowati itulah Sultan HB I mendeklarasikan Hadeging Nagari, 13 Maret 1755. "Situs ini berada di kompleks Tamansari, Kraton Yogyakarta, dan tidak banyak orang tahu," kata Sejarawan UGM Baha Uddin MHum.

Situs Gedhong Garjitowati, lanjut Baha Uddin, dahulu adalah pesanggrahan atau gedhong yang dibangun Sunan Amangkurat IV (ayahanda Sultan HB I). Pesanggrahan itu dijadikan sebagai tempat untuk transit ketika akan berziarah ke makam Imogiri. Di sebelah Gedhong Garjitowati terdapat Umbul Pacetokan. "Saat ini situs Gedhong Garjitowati hanya tersisa beberapa umpaknya saja," katanya.

Sesuai usulan Pemda DIY, peristiwa Hadeging Nagari, 13 Maret 1755 dijadikan acuan ditetapkan Hari Jadi DIY oleh Panitia Khusus (Pansus) BA 45 DPRD DIY, karena dengan peristiwa tersebut Nagari Ngayogyakarta secara resmi berdiri. "Hadeging Nagari menjadi salah satu bukti penting eksistensi berdirinya sebuah Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat yang bercita-cita menjadi se-

buah nagari yang makmur dan mampu mensejahterakan rakyatnya," kata Baha Uddin, anggota tim penyusun Naskah Akademik Hari Jadi DIY.

Dalam peristiwa Hadeging Nagari, Sultan HB I secara resmi menggunakan nama Ayodhya, Ngayogyakarta selanjutnya menjadi Ngayogyakarta Hadiningrat, sebagai nama resmi nagari sekaligus nama ibukotanya. "Ngayogyakarta itu simbol adanya nagari baru hasil Palihan Nagari Kerajaan Mataram Islam," katanya.

Menurut Baha Uddin, ada tiga peristiwa yang menjadi cikal bakal Yogyakarta. Ketiga itu merupakan satu kesatuan. Pertama, Perjanjian Giyanti, 13 Februari 1755, simbol pengakuan politik keberadaan entitas baru Palihan Nagari. Hasil Perjanjian Giyanti salah satunya membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.

Kedua, lanjut Baha Uddin, kesepakatan Jatisari, 15 Februari 1755 antara Sultan HB I dengan Sunan PB III. Kesepakatan Jatisari adalah simbol pengakuan kultural terhadap identitas Kasultanan Yogyakarta yang dikembangkan Sultan HB I, dan merupakan kelanjutan dari identitas kultural Ke-

rajaan Mataram Islam.

Selanjutnya ketiga, berdasarkan Perjanjian Giyanti dan Kesepakatan Jatisari, Sultan HB I mendeklarasikan Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. "Inilah yang menjadi peristiwa puncak," katanya.

Peristiwa tersebut menjadi penanda penting, karena selain secara resmi berdiri Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat kemudian juga diciptakan birokrasi pemerintahan Kasultanan Yogyakarta, sehingga dalam teori kenegaraan sah sebagai sebuah negara, yaitu ada wilayah, ada pemimpin, ada birokrasi, dan ada rakyat Yogyakarta.

Mengingat pentingnya peristiwa sejarah asal-usul ini, Paniradya Kaistimewan DIY bersama Sekber Keistimewaan DIY dan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) menyelenggarakan Sinau Sejarah Keistimewaan DIY, 'Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat', Kamis (13/3), pukul 15.30 di Bangsal Wiyata Praja, Kompleks Kantor Gubernur DIY, dan ditayangkan *live streaming* melalui *channel* YouTube Paniradya Kaistimewaan DIY.

Dalam Sinau Sejarah ini akan digelar dialog keistimewaan bertema 'Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat: Menyelamatkan Warisan Memori Keistimewaan DIY' dengan narasumber Aris Eko Nugroho SP MSi (Paniradya Pati Kaistimewaan DIY), Baha Uddin MHum (Sejarawan UGM) dan Agus Tony Widodo SPd (Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia/AGSI DIY, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Bantul). Selain itu ada pula pemutaran video dokumenter '13 Maret, Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat' dan dimeriahkan tari serta musik gamelan. (Wan)

## Hikmah Ramadan

### Berpuasa, Jujur, dan Sabar

**BERPUASA** adalah mencegah makan dan minum sejak terbitnya fajar sidik hingga terbenamnya matahari. Prinsip utama puasa adalah mencegah yang diniati karena Allah, bukan karena yang lain. Puasa Ramadan memiliki hukum wajib bagi umat Islam. Tujuan puasa agar kita menjadi orang yang takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Inti puasa adalah patuh kepada Allah, patuh melaksanakan perintah dan patuh menjauhi larangan. Sikap patuh ini merupakan salah satu pendidikan karakter yaitu patuh melaksanakan kebenaran dan patuh menjauhi kebatilan, kemaksiatan.

Wijaya Heru Santosa



Berpuasa melatih kita untuk meningkatkan karakter kejujuran karena tidak ada makhluk lain yang bisa mengawasi kejujuran kita selain Allah. Untuk meningkatkan kesadaran berbuat jujur hanya dari diri sendiri yang dilandasi rasa takut siksaaan Allah. Misal, orang yang berbuka puasa sebelum waktunya, mulutnya akan dirobrek di neraka, sebagaimana Rasulullah mengisahkan mimpi beliau "Kemudian aku dibawa, tiba-tiba aku melihat sekelompok orang tergantung (terbalik) dengan urat-urat kaki mereka (di sebelah atas), ujung-ujung mulut mereka disobek mengeluarkan darah. Aku bertanya "Mereka itu siapa?" Mereka menjawab "Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya (HR. An-Nas'i, Ibnu Habbab, al-Hakim, al-Baihaqi).

Jujur adalah berbuat atas dasar kebenaran, baik kebenaran subjektif, objektif, ilmiah maupun kebenaran filosofis. Kejujuran sangat diperlukan di masyarakat golongan apa saja. Dengan kejujuran, seseorang akan meraih kesuksesan. Para pedagang akan banyak langganannya karena dapat dipercaya atas kualitas dagangannya. Para dosen akan sukses karier akademiknya karena kejujuran dalam berkarya ilmiah merupakan prioritas moral tertinggi yang diutamakan oleh seorang dosen dalam dunia akademik. Para pemimpin dan politisi yang jujur akan kian dipercaya dan dicintai oleh pengikutnya. Orang yang jujur bila ber-

pendapat sesuai fakta dan fenomena yang telah teruji kebenarannya, baik kebenaran rasional maupun kebenaran empirik.

Puasa juga akan melatih kesabaran. Memang sabar itu mudah diucapkan, tetapi sulit dilaksanakannya. Orang yang berpuasa akan menghadapi berbagai ujian dalam dunia pergaulan. Misal, menghadapi orang marah, menghadapi orang yang mengajak bertengkar berdebat, fitnah dan *ghibab*. Kita tidak perlu melayani ajakan yang mempengaruhi kualitas berpuasa. Bertengkar bukan membatalkan puasa, tetapi mengurangi kualitas puasa. Orang berpuasa perlu memahami hakikat sabar adalah menahan keinginan untuk berbuat yang tidak seharusnya. Sabar adalah menghargai proses, sabar menghadapi musibah, menghadapi cobaan yang begitu berat bagi kita, karena Allah akan selalu menguji makhluknya sebagaimana dalam firmannya "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wainna ilaihi roji'un" (Al Baqarah : 155-156).

Orang yang sabar tidak boleh mengeluh, harus optimis hal ini tercermin bagi diri orang yang sedang berpuasa walaupun perut lapar, keroncongan, tetapi tetap sabar menanti saat berbuka puasa hanya karena Allah, bukan karena malu kepada orang lain, terus mengikuti proses sesuai dengan mekanisme berpuasa dengan laku jujur dan sabar atas kesadaran diri sendiri. Bila puasa kita selalu dikawal dengan karakter jujur dan sabar, insya Allah tujuan puasa, yaitu menjadi orang yang bertakwa akan berhasil dan pada akhirnya akan ada pengampunan dari Allah SWT. (\*)-d

Dr Wijaya Heru Santosa MPd,  
Dosen Pumatugas Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

### PENYIDIKAN KORUPSI PENGADAAN LNG

## KPK Periksa Nicke Widyawati

**JAKARTA (KR)** - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pertamina Nicke Widyawati (NW) sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina pada tahun 2011-2021. Nicke Widyawati juga diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2018-2024.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,atas nama AB, NS, YA, NW, DAS, dan WM," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat

dikonfirmasi di Jakarta, Senin (10/3).

Menurut informasi, para saksi lainnya adalah Direktur Keuangan PT Pertamina 2014-2017 Arif Budiman (AB),Direktur Keuangan PT PGN 2016-April 2018 Nusantara Suyono (NS),Direktur Gas PT Pertamina 2014-2017 Yenni Andayani (YA), Direktur PT PGN Desima A. Siahaan (DAS), dan Direktur Utama PT Pertamina Wiko Migantoro. Penyidik KPK juga turut memeriksa Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada tahun 2019/2024 Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok pada hari Kamis (9/1/2024). (Ant/Has)-d